

Pengaruh Audit Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Alor

Nonce Farida Tuati¹⁾, Deetje W. Manuain²⁾, Hapsa Usman³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

^{1,2,3)}nonce.tuati@pnk.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analysis the influence of performance audit variables and the clarity of budget targets on the accountability of the performance of government agencies in Alor Regency, both partially and simultaneously. This study uses a quantitative approach with a descriptive method. The research population is officials involved in regional financial management, especially those responsible for the management of the APBD in the regional apparatus organization (OPD) of the Alor Regency Government. Data collection was carried out through questionnaires, which provided primary data directly from respondents. The results of this questionnaire were then analysis using multiple regression analysis. Based on data analysis, it was found that, performance audits variables and clarity of budget targets had a significant influence on the performance accountability of government agencies. Thus, these two variables have a positive impact when applied comprehensively in the government management system.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel audit kinerja dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Alor, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitiannya pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan APBD di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Alor. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, yang memberikan data primer langsung dari responden. Hasil kuesioner ini kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa variabel audit kinerja dan kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, kedua variabel ini memiliki dampak positif ketika diterapkan secara komprehensif dalam sistem pengelolaan pemerintahan..

Kata kunci : audit kinerj, kejelasan sasaran anggaran; akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah agar mengelola pemerintahan serta keuangannya secara mandiri dengan didasari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan setiap daerah agar mampu menggali potensi-potensi yang dimilikinya sehingga dapat membiayai dirinya sendiri dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Daerah dituntut juga bisa memberikan petanggungjawaban atau akuntabilitas secara transparan mengenai penggunaan sumber-sumber atau potensi-potensi yang dimiliki.

Dalam konteks ini, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi hal yang tak terelakkan. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan no.88 Tahun 2021) sedangkan Akuntabilitas Kinerja menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.²⁾

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tercermin dari faktor audit kinerja organisasi. Audit Kinerja menurut UU No.15 Tahun 2004 yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan

negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Hal tersebut sejalan dengan Hasil studi menunjukkan bahwa audit kinerja sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya, semakin sering melakukan audit kinerja sektor publik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa fungsi audit kinerja sektor publik mampu menjelaskan variasi akuntabilitas publik. Manfaat utama dilakukannya audit kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas publik. Audit kinerja memiliki peran yang lebih penting sebagai alat jaminan dalam hal akuntabilitas kepada publik. Praktik audit kinerja yaitu termasuk pengukuran kinerja, digunakan untuk menilai dan memverifikasi nilai uang dalam sebuah organisasi pemerintahan dan untuk meningkatkan akuntabilitas (Susbiani, 2016).

Selain faktor audit kinerja, faktor kejelasan sasaran juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Indonesia. Kejelasan sasaran merujuk pada sejauh mana tujuan dan target kinerja instansi pemerintah telah ditetapkan dengan jelas dan dapat diukur. Hal ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dibutuhkan kejelasan tentang anggaran yang telah ditetapkan karena sasaran anggaran yang jelas menyebabkan proses yang berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan mampu menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi atau instansi (Hasanah, 2021)

Pemerintah Kabupaten Alor telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Alor tahun 2022, Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dari 9 (sembilan) indikator sasaran tersebut, sebanyak 2 (dua) indikator sasaran telah mencapai target yang ditetapkan, 1 (satu) indikator kinerja sasaran tidak mencapai target dan 1 (satu) indikator sasaran masih dalam proses evaluasi.

Terkait peningkatan nilai rata-rata AKIP, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36, dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Zona Integritas tahun 2023 di Badung Bali, Rabu (06/12).

Pemerintah Kabupaten Alor merupakan bagian dari hal ini untuk itu diharapkan kedepan p-ISSN: 2302-9560/e-ISSN: 2597-4599

pemerintah Kabupaten Alor dapat meningkatkan kinerja AKIP dengan perolehan skor yang semakin tinggi yang berarti kinerjanya pemerintah semakin baik. Melihat fenomena ini maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh audit Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Alor.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Alor, untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Alor dan untuk mengetahui Pengaruh Audit Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Alor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari pengembangan ilmu akuntansi dan dapat menjadi referensi dalam memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah. Urgensi penelitian ini adalah dengan adanya hasil/luaran penelitian ini berguna pemerintah kabupaten/kota di NTT mengevaluasi pelaksanaan dan pengawasan anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Audit Kinerja

Audit kinerja adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam penggunaan sumber daya suatu organisasi, Mardiasmo (2018). Audit kinerja berfokus pada bagaimana anggaran dan sumber daya lain digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, serta apakah penggunaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Indicator audit kinerja yaitu: efektifitas, efisiensi, ekonomis, kepatuhan terhadap regulasi.

H1: Audit kinerja berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah tingkat di mana sasaran anggaran yang ditetapkan spesifik, jelas, dan dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Halim menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran dalam sektor publik, terutama pada organisasi pemerintahan, dapat membantu meningkatkan fokus dan akuntabilitas karena seluruh anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai (Halim, 2019). Indikator kejelasan sasaran anggaran seperti: tujuan yang spesifik, ukuran kinerja yang terukur, konsistensi antara alokasi dana dan kegiatan, realistik dan dapat dicapai dan penentuan jangka waktu yang jelas.

H2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021, akuntabilitas kinerja adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas hasil kerja instansi pemerintah dalam upaya mencapai kinerja yang transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja harus diwujudkan dalam bentuk laporan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu: Transparansi, kepatuhan terhadap perundang-undangan, efisiensi dalam penggunaan sumber data, efektivitas dalam pencapaian tujuan, kualitas pelayanan, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas anggaran dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.

H3: Audit kinerja dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitiannya pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan APBD di organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Alor. Teknik sampling menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, yang memberikan data primer langsung dari responden sebanyak 95 responden. Teknik Analisa data menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis, digunakan uji t (untuk melihat pengaruh variabel secara parsial) dan uji F (untuk melihat pengaruh secara simultan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik

Tabel 1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.99505264
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.048
	Negative	-.073
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber Data : diolah, 2024

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa uji normalitas ini, diperoleh p-value sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal. Normalitas residual ini merupakan salah satu asumsi penting dalam regresi linier, dan hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi tersebut. Nilai mean residual sebesar 0,000 dan standard deviation sebesar 3,995. Mean yang mendekati nol menunjukkan bahwa residual rata-rata memiliki distribusi yang seimbang.

Tabel 2. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	B	Unstandardized Coefficients	Standar dized Coeffici ents		Sig.
			Std. Error	Beta	
1 (Constant)	20.033	3.954			5.067 .000
TOTAL	.701	.768	.376	.913	.364
KSA					
TOTAL	.117	.658	.073	.177	.860
AK					

Sumber Data : diolah, 2024

Hasil analisis data di atas pada Tabel 2 dapat dibuatkan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 20.033 + 0,117X_1 + 0,701X_2$$

Dimana: Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

X₁ = Audit Kinerja

X₂ = Kejelasan Sasaran Anggaran

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Nilai Konstanta (20.033): Apabila variabel Audit Kinerja (X₁) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X₂) diasumsikan bernilai nol, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) diperkirakan sebesar 20.033. Ini menunjukkan nilai dasar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tanpa pengaruh dari kedua variabel bebas.
- Koefisien Regresi untuk Audit Kinerja (X₁) nilai t sebesar 0,177 dan p-value sebesar 0,860. Karena p-value > 0,05, variabel ini tidak signifikan secara statistik dalam model untuk memprediksi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).
- Koefisien Regresi untuk Kejelasan Sasaran Anggaran (X₂) sebesar 0,701 dengan nilai t sebesar 0,913 dan p-value sebesar 0,364. Karena p-value > 0,05, variabel ini tidak signifikan secara statistik dalam model untuk

memprediksi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Tabel 2 di atas menunjukkan nilai dari variabel Audit kinerja dengan nilai t sebesar 0,177 dan p-value sebesar 0,860. Karena p-value > 0,05, variabel ini tidak signifikan secara statistik dalam model untuk memprediksi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Nilai dari variable Kejelasan Sasaran Anggaran adalah 0,701, nilai t sebesar 0,913 dan p-value sebesar 0,364 Sama halnya dengan Audit Kinerja juga tidak signifikan dalam model (p-value > 0,05).

Tabel 3. Uji Secara Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	375.150	2	187.575	11.502	0.000 ^b
Residual	1500.282	92	16.307		
Total	1875.432	94			

- a. Dependent Variable: TOTAL AKI
b. Predictors: (Constant), TOTAL AK, TOTAL KSA
Sumber Data : diolah, 2024

Dari Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Nilai F adalah 11,502, dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Karena p-value < 0,05, maka menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa model regresi yang dibentuk secara keseluruhan signifikan secara statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Audit Kinerja dan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS didapatkan hasil R² yang ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b			
Mode	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1 R	.200	.183	4.038

- a. Predictors: (Constant), TOTAL AK, TOTAL KSA
b. Dependent Variable: TOTAL AKI

Sumber Data : diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4, Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,200 menunjukkan bahwa Audit Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran bersama-sama menyumbang sebesar 20% terhadap variasi Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Alor. Ini berarti bahwa 20% perubahan dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Alor

p-ISSN: 2302-9560/e-ISSN: 2597-4599

dapat dijelaskan oleh kedua variabel ini, sedangkan 80% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil ini mengindikasikan adanya variabel-variabel eksternal lain yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan namun belum diteliti dalam penelitian ini.

Hasil pengolahan data secara statistik bahwa meskipun secara simultan variabel Audit Kinerja dan variable Kejelasan Sasaran Anggaran signifikan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis mengenai adanya pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas instansi pemerintah tidak terbukti. Dengan nilai t sebesar 0,177 dan p-value sebesar 0,860 (di atas ambang batas signifikan 0,05), hasil ini mengindikasikan bahwa audit kinerja tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk memprediksi akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah daerah dalam model yang digunakan. Sehingga, hipotesis alternatif (H1) ditolak, dan hipotesis nol (H0) diterima, yang menyatakan bahwa audit kinerja tidak signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja.

Audit kinerja pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dengan mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam penggunaan sumber daya pemerintah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit kinerja saja tidak cukup untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti kualitas tindak lanjut audit, komitmen pimpinan terhadap hasil audit, atau bahkan resistensi dalam implementasi rekomendasi audit.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggreni (2021), yang juga menemukan bahwa audit kinerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, penelitian ini bertentangan dengan temuan Susbiyani (2016), yang menyatakan bahwa audit kinerja berpengaruh signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas. Perbedaan hasil ini mungkin terjadi karena perbedaan konteks atau metodologi penelitian, atau perbedaan dalam sistem pengelolaan dan penerapan audit kinerja di masing-masing daerah atau instansi yang diteliti.

Meskipun audit kinerja diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, hasil ini menunjukkan bahwa audit kinerja saja belum cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini membuka peluang untuk meneliti faktor lain yang mungkin berpengaruh, seperti integritas manajemen, sistem pengawasan internal, budaya organisasi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Faktor-

faktor ini mungkin lebih relevan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil ini, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan strategi lain di samping pelaksanaan audit kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas. Peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menekankan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, meningkatkan kapasitas pengelola anggaran, serta memperkuat sistem pengawasan internal. Selain itu, penting bagi pimpinan untuk menunjukkan komitmen dalam memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi audit agar hasil audit dapat memberikan dampak yang nyata terhadap akuntabilitas kinerja.

Mengingat hasil yang menunjukkan bahwa audit kinerja tidak signifikan terhadap akuntabilitas, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memeriksa konteks atau kondisi khusus di mana audit kinerja mungkin lebih efektif. Penelitian lanjutan bisa menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami bagaimana proses dan implementasi audit di lapangan, serta hambatan yang dihadapi dalam memanfaatkan hasil audit untuk meningkatkan akuntabilitas. Secara keseluruhan, hasil ini memberikan wawasan bahwa meskipun audit kinerja penting, masih ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan untuk mencapai akuntabilitas yang lebih baik di lingkungan pemerintahan.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditolak. Artinya, kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dalam penelitian ini. Hal ini didukung oleh nilai t sebesar 0,913 dan p -value sebesar 0,364, di mana p -value yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja tidak signifikan.

Kejelasan sasaran anggaran sering kali dianggap penting dalam pengelolaan anggaran pemerintah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan tujuan dan prioritas instansi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak cukup untuk menjamin peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kata lain, meskipun sasaran anggaran sudah jelas, hal itu belum tentu diikuti oleh peningkatan akuntabilitas jika tidak didukung oleh faktor-faktor lain.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Padmadiani (2023) yang juga menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak selalu berdampak signifikan pada akuntabilitas kinerja. Namun, penelitian ini bertentangan dengan temuan Hasanah (2021), yang menemukan bahwa kejelasan sasaran

anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh perbedaan kontekstual, seperti lingkungan organisasi, budaya kerja, atau kebijakan pengelolaan anggaran di masing-masing daerah yang menjadi objek penelitian.

Mengingat bahwa kejelasan sasaran anggaran ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor lain yang mungkin lebih berperan dalam meningkatkan akuntabilitas. Faktor-faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengawasan internal, keterlibatan manajemen puncak, serta teknologi informasi dapat menjadi fokus penelitian di masa depan karena berpotensi lebih berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Berdasarkan hasil ini, pemerintah daerah dapat meninjau kembali pendekatan dalam pengelolaan anggaran. Memastikan kejelasan sasaran anggaran tetap penting, tetapi perlu juga diimbangi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat serta peningkatan kapasitas SDM untuk mencapai akuntabilitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, meskipun kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh langsung, tetapi perlu diperkuat bersama dengan faktor-faktor lain untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif dalam meningkatkan akuntabilitas.

Mengingat hasil yang tidak signifikan ini, penting untuk melakukan penelitian lanjutan di wilayah atau sektor lain untuk memastikan apakah hasil serupa ditemukan atau ada variasi pengaruh di tempat lain. Studi komparatif di antara beberapa daerah atau menggunakan metode yang berbeda dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait peran kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahan.

Pengaruh Audit Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga, yang menyatakan bahwa audit kinerja dan kejelasan sasaran anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, diterima. Dengan p -value sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), ini menandakan bahwa model regresi yang dibentuk secara keseluruhan memiliki signifikansi statistik, sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima. Ini berarti bahwa gabungan dari audit kinerja dan kejelasan sasaran anggaran mampu secara signifikan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah Kabupaten Alor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Alor telah berhasil menerapkan audit kinerja yang baik, serta menetapkan sasaran anggaran yang jelas. Kombinasi dari kedua aspek ini membantu pemerintah memastikan bahwa sumber daya dikelola secara efisien dan efektif, serta mendukung akuntabilitas dalam penggunaannya. Artinya, penerapan audit

kinerja dan kejelasan sasaran anggaran yang dijalankan bersama-sama memberikan dampak positif terhadap tingkat akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan tersebut.

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan untuk terus memperkuat penerapan audit kinerja sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Alor. Di samping itu, penting untuk memastikan kejelasan sasaran anggaran dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, para pemangku kepentingan dapat memahami tujuan anggaran dengan lebih baik, sehingga setiap pihak yang bertanggung jawab akan lebih termotivasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Para ahli seperti Peter F. Drucker (2020) menggarisbawahi pentingnya kejelasan sasaran anggaran dalam konteks manajemen pemerintah. Drucker berpendapat bahwa kejelasan sasaran anggaran mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, serta membantu mempertahankan akuntabilitas dalam penggunaannya. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian ini, di mana kejelasan sasaran anggaran terbukti berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim (2019), yang menyatakan bahwa anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama dalam pemerintahan. Kejelasan sasaran anggaran diartikan sebagai tingkat kejelasan dan spesifikasi tujuan anggaran, yang dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Selain itu, penelitian ini mendukung hasil studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Hasanah (2021) dan Susbiyani (2016), yang menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas di instansi pemerintah.

Berdasarkan implikasi dari hasil penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Alor disarankan untuk mempertahankan penerapan audit kinerja yang konsisten dan mengikutsertakan kejelasan sasaran anggaran dalam setiap tahap penganggaran. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk mengembangkan kebijakan dan pedoman yang mendukung transparansi dalam pengelolaan anggaran. Praktik-praktik ini diharapkan dapat membantu pemerintah mencapai hasil yang lebih baik serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara audit kinerja dan kejelasan sasaran anggaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kombinasi dari kedua variabel ini memberikan efek yang lebih kuat terhadap peningkatan akuntabilitas, sehingga direkomendasikan untuk terus memperkuat penerapan kedua aspek ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara simultan, variabel Audit Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Secara parsial, baik Audit Kinerja maupun Kejelasan Sasaran Anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Model ini hanya mampu menjelaskan 20% dari variasi Akuntabilitas Kinerja, sehingga terdapat faktor-faktor lain yang juga berperan namun belum diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran berdasarkan kesimpulan tersebut:

1. Karena model ini hanya mampu menjelaskan 20% dari variasi Akuntabilitas Kinerja, disarankan agar penelitian selanjutnya memasukkan variabel lain yang potensial mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Beberapa variabel yang bisa dipertimbangkan antara lain kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi.
2. Walaupun secara parsial variabel Audit Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran tidak signifikan, namun secara simultan kedua variabel ini berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja. Oleh karena itu, instansi pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas audit kinerja dan memperjelas sasaran anggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus bagi auditor, serta peningkatan komunikasi dan sosialisasi mengenai tujuan anggaran kepada seluruh pegawai.
3. Instansi pemerintah disarankan untuk melakukan evaluasi sistem dan kebijakan yang mendukung akuntabilitas kinerja secara menyeluruh. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau diubah agar akuntabilitas kinerja semakin optimal dan transparan.
4. Disarankan untuk mencoba metode atau model analisis yang berbeda, seperti model regresi yang lebih kompleks atau analisis struktural, guna mengidentifikasi hubungan antarvariabel yang mungkin lebih mendalam. Hal ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pengaruh faktor lain terhadap akuntabilitas kinerja.
5. Mengingat pentingnya akuntabilitas dalam menciptakan kinerja yang baik, disarankan agar instansi pemerintah mendorong kolaborasi antardepartemen. Kolaborasi yang baik dapat membantu dalam penyusunan sasaran anggaran yang lebih jelas serta pelaksanaan audit kinerja yang lebih efektif.

JURNAL MANEKSI VOL 14, NO. 01, MARET 2025

Dengan saran-saran ini, diharapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat lebih ditingkatkan, serta penelitian di masa depan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Achmad Tjahjono, Muh Fakhri Husein. (2019). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Revisi. Cetakan keempat. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Anggreni, N. P. D., & Sumadi, N. K. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Hita Akuntansi dan Keuangan, 2(3), 386-405.
- Drucker, P.F. *The essential drucker*. Routledge.
- Hasanah, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)(Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Padmadiani, R., Blongkod, H., & Wuryandini, A. R. (2023). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo)*. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 7(1), 240-251.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- R. Gunawan, F. 2014. *Analisis Regresi Linear Berganda dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Septiyani, A. (2010). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada P* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susbiyani, A. (2016). *Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bondowoso*. JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia), 1(1).
- Tuati, N. F., Siahaan, M., & Samadara, S. (2021, April). *The Impact of Accountability and Transparency on the Management of the Regional Expenditure Budgets of the Kupang District Government*. In International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020) (pp. 515-518). Atlantis Press.